

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 4571/MD-D/SD-S1/2021

**PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

NOVIA ANJAR SARI
NIM. 11744202652

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Novia Anjar Sari**
 NIM : **11744202652**
 Judul : **Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:
 Hari : **Selasa**
 Tanggal : **09 Maret 2021**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Dekan,

Dr. Nurjain, M.A
 NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji.

Ketua/Penguji I

Dr. Toni Hartono, M.Si
 NIP. 19780605 200701 1 024

Penguji III

Zulkarnain, M. Ag
 NIP. 197102122003121002

Sekretaris/Penguji II

Nur Alhidayatillah, M. Kom I
 NIK. 130 417 027

Penguji IV

Mublasin, S. Ag. M. Pd. I
 NIP. 196805152005011009



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Novia Anjar Sari
Nim : 11744202652
Judul Skripsi : **Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Pembimbing,

Imron Rosidi, S.Pd. M.A. Ph.D
NIP. 19811118 2009011006

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.01.25 19:25:40+07'00'

Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 19710612 19983 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Novia Anjar Sari

NIM : 11744202652

Judul : "Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau"

Telah diseminarkan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Mei 2020

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2020

Penguji Seminar Proposal

Penguji I

penguji II


Drs. H. Arwan, M.Ag
NIP.19660225 19933 1 002


Drs. Syahril Romli, M.Ag
NIP.19570611 198803 1 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Anjar Sari
 NIM : 11744202652
 Tempat/tanggal lahir : Balam Sempurna, 20 November 1999
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul : **“Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



NOVIA ANJAR SARI

NIM. 11744202652



SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Dr. Masduki, M. Ag
Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
Kominikasi : A.n Novia Anjar Sari

Kepada Yth,
Dekan
Fakultas Dakwah dan
di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari **Novia Anjar Sari, NIM. 11744202652** dengan judul **"Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2021.01.25 19:26:18 +07'00'

Dr. Masduki, M. Ag
NIP. 19710612 19983 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Oleh:

Novia Anjar Sari

Skripsi ini membahas tentang persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teori Suharsimi Arikunto yang mana apabila populasi kurang dari 100 maka diambil semua sebagai sampel dan jika populasi diatas seratus bisa diambil 10%-15%, 20%-25% dan seterusnya. Adapun populasi Anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berjumlah 45 orang, dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel karena populasi yang akan diteliti kurang dari 100 orang anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, angket, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dikategorikan “Baik” dengan hasil persentasi rata-rata (*mean*) sebesar (76%). Dari hasil persentase 3 aspek yakni, aspek kognitif (76,8%), aspek afektif (82,13%), dan aspek konatif (67,9%) yang paling dominan adalah aspek afektif dengan jumlah persentase 82,13%.

Kata Kunci: *Persepsi, Pengelolaan, Zakat Profesi.*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”, shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan batuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setingginya penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, terimakasih Ayahanda tercinta alm. Sajidi bin Sanmueni yang telah memberikan banyak pelajaran, motivasi serta do'a dan dukungan kepada penulis. Terimakasih ibunda tercinta Lisnawati binti Ahmad Ibrahim yang selalu memberikan dukungan dan mendo'akan disetiap langkah penulis dan juga teruntuk saudari kandung penulis Septi Lia Rahmadani. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar penulis.
2. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. Masduki, M.Ag. Dr. Toni Hartono, M. Si dan Dr. Azni, M.Ag selaku wakil dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
6. Imron Rosidi, S.Pd, MA selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Perdamaian, M.Ag. sebagai Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.
11. Yunita Syahpriani, S.STP, M.Tr.I.P yang telah memotivasi dan banyak membantu penulis.
12. Saiful Hotma Panjaitan. SE Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Rokan Hilir dan Nurfazilayani, SE Bendahara Baznas Kabupaten Rokan Hilir yang telah banyak membantu penulis.
13. Teman seperjuangan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Lokal B Fitria, Wirda Wati, Messy Shafitri, Mukti Ambar Sari, M. Aviv Dwi Maulana, Amelia.
14. Teman-teman Magang Baznas Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 Aji Purnomo, Lusiana Putri, Maisaroh Zandato, Muhammad Rianda, Rusnah.
15. Sudarno Irfandi, Ari Irawan, Rafie Hasan, S. Sos, Neni Rahma Wani, Dewi Lestari teman, sahabat, sekaligus keluarga yang telah memberikan dorongan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan motivasi, serta tempat bertukar pikiran dan memberikan bantuan tenaga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Selain itu semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan dapat balasan yang baik pula dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Amiin yaa Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

Novia Anjar Sari
NIM:11744202652



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	2
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL	
A. Kajian Teori.....	6
B. Kajian Terdahulu	37
C. Konsep Operasional.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Populasi dan Sampel	41
E. Data dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Instrumen Penelitian.....	42
H. Uji Validitas	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Rokan Hilir.....	45
B. Letak Geografis Kabupaten Rokan Hilir	45
C. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Masa Jabatan 2019-2024	46
D. Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir	48
E. Agama.....	48
F. Usia	48
G. Pendidikan.....	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Aspek Kognitif	50
B. Aspek Afektif	54
C. Aspek Konatif.....	58
D. Pembahasan	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Penerbit: UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

1. Aspek Kognitif	62
2. Aspek Afektif	64
3. Aspek Konatif	65



DAFTAR TABEL

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.		
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.		
Tabel 4.1	Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Masa Jabatan 2019-2024	47
Tabel 4.2	Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.3	Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Agama	48
Tabel 4.4	Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Usia	48
Tabel 4.5	Pendidikan Anggota Legislatif Kab. Rokan Hilir	49
Tabel 5.1	Pengetahuan Anggota Legislatif tentang Sistem Pengelolaan Zakat Profesi	50
Tabel 5.2	Pengetahuan Anggota Legislatif tentang hukum Pengelolaan Zakat Profesi	51
Tabel 5.3	Pengetahuan Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan Zakat Profesi	52
Tabel 5.4	Pengetahuan Anggota Legislatif tentang landasan/Undang-Undang Pengelolaan Zakat Profesi	52
Tabel 5.5	Pengetahuan Anggota Legislatif mengenai jumlah dana Zakat Profesi yang dihimpun	53
Tabel 5.6	Penilaian Anggota Legislatif tentang sistem Pengelolaan Zakat Profesi	54
Tabel 5.7	Tanggapan Anggota Legislatif tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir	55
Tabel 5.8	Penilaian Anggota Legislatif terhadap pendapatan jumlah dana Zakat Profesi yang telah dikelola oleh amil	56
Tabel 5.9	Penilaian Anggota Legislatif tentang badan amil zakat harus melakukan survei terhadap mustahiq	57
Tabel 5.10	Penilaian anggota legislatif terhadap pendistribusian yang dilakukan oleh badan amil zakat Kabupaten Rokan Hilir	57
Tabel 5.11	Anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir ikut membantu dalam pengesahan perda zakat	58
Tabel 5.12	Anggota Legislatif membantu badan amil zakat melakukan survei terhadap mustahik	59
Tabel 5.13	Anggota legislatif setuju mengikuti rapat sebelum Baznas melakukan pendistribusian zakat profesi	60
Tabel 5.14	Anggota legislatif membantu badan amil zakat dalam penerimaan zakat profesi	60
Tabel 5.15	Anggota legislatif membantu mengantar dana zakat profesi yang siap untuk didistribusikan kepada mustahiq	61
Tabel 5.16	Hasil Rekapitulasi Angket Indikator Persepsi Kognitif	62
Tabel 5.17	Hasil Rekapitulasi Angket Indikator Persepsi Afektif	64
Tabel 5.18	Hasil Rekapitulasi Angket Indikator Persepsi Konatif	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, telah terbit Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang lahir pada 27 Oktober 2011. Zakat profesi dalam perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memberikan penegasan bahwa zakat profesi telah resmi dan sah terlembaga secara formal, mengikat dan yuridis dalam regulasi negara Indonesia.

Disamping itu Undang-undang Zakat ini bisa di optimalkan sebagai sarana dan acuan pengelolaan. Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya¹.

Sejalan dengan pendapat diatas pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga². Tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berkembang cukup baik setelah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat, disamping itu ada juga hal-

¹ Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: Cv. Rajawali, 1988), hlm.

² Muklisin, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produkti (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol 17, no. 2(Juli-Desember 2018), hlm. 207



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hal yang perlu diperhatikan lagi dari segi pengelolaan yang mencakup dalam pengumpulan dana zakat profesi yang sedikit terhambat dikarenakan kondisi sosial yang terjadi sekarang ini (Covid 19). Dari segi pendistribusian dana zakat sudah berjalan sedari dulu namun ada beberapa hal yang menarik perhatian diantaranya belum terciptanya pemerataan atas penerimaan dana zakat di setiap desa, dalam hal yang lainnya yang menarik perhatian adalah tentang pengelolaan keuangan di Baznas Kabupaten Rokan Hilir yakni kurangnya transparansi dana yang terperinci disetiap pengelolaan keuangan. Bazanas Kabupaten Rohil dituntut menciptakan kerja sama dalam hal yang terkait dengan pengelolaan zakat profesi dengan pihak-pihak instansi seperti anggota legislatif, dalam hal ini memberikan ruang untuk kedua pihak turut dan ikut andil dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersifat umum seperti pendistribusian dana zakat, dan kegiatan lainnya yang tentunya tidak mempengaruhi kondisi internal di Baznas Kabupaten Rokan Hilir sendiri.

Fenomena-fenomena yang ada di Baznas Kabupaten Rokan Hilir terpapar di paragraf diatas yang membuat peneliti tertarik untuk mengupas lebih jauh dan terperinci sehingga akan dijadikan masalah dalam pembahasan skripsi ini. Untuk itu peneliti tertarik meneliti dengan adanya fenomena yang akan diangkat adalah bagaimana pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir yang dikaitkan dengan persepsi anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Persepsi Anggota Legislatif terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”**.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, penulis perlu menegaskan beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian yaitu:



1. Persepsi Anggota Legislatif

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan nya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.³

Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintahan dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang⁴. Menurut pemahaman penulis persepsi anggota legislatif adalah respon badan legislatif dalam memahami informasi tentang lingkungan nya baik lewat pengenalan terhadap situasi dan memiliki kuasa untuk membuat hukum, menetapkan hukum sehingga dapat dipergunakan terhadap kepentingan-kepentingan yang selaras dengan aturan hukum yang ditetapkan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *management*, menurut Arifin Abdurrachman dalam Purwanto (2009) mengemukakan bahwa manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Sedangkan pengelolaan itu sendiri memiliki

³ Miftah thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1983), hlm. 144

⁴ Abdurrafi Arya, "Lembaga Legislatif", Dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_legislatif, (diakses 14 Maret 2020)



3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Zakat profesi juga merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui keahlian tertentu⁵.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada jurusan Manajemen Dakwah.
2. Sebagai penambah wawasan masyarakat dan juga pembaca tentang persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

⁵ Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 54

⁶ Syanita Khusnul Khotimah dan Fina Julfiani, *Kumpulan Tulisan "Kompilasi Fiqih Ibadah Milenial"*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 109



F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini dalam 6 (enam) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah (bila perlu), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian teoritis, kajian terdahulu dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Sejarah Kabupaten Rokan Hilir, letak geografis kantor anggota legislatif, jumlah anggota legislatif, usia, dan pendidikan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, tentang persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Persepsi

a. Pengertian persepsi

Dalam perspektif psikologis, persepsi adalah suatu proses menginterpretasi atau menafsirkan informasi yang diterima lewat alat indra manusia; indera mata dalam melihat gambar dan membaca, mendengarkan suara atau informasi auditif dan sebagainya. Dalam persepsi, pengetahuan yang telah dimiliki (yang disimpan dalam ingatan) dipakai sebagai bahan untuk menangkap, mendeteksi dan menginterpretasi rangsangan yang masuk lewat alat indera manusia.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya⁷. Menurut Robbins dalam Suharman, persepsi adalah yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indra mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka⁸.

Menurut Brian Fellows persepsi meliputi penginderaan (sensasi) melalui alat-alat indera kita (yakni indera peraba, indera penglihat, indera pencium, indera pengecap, atau indera pendengar, atensi dan interpretasi. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirim ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan pengecap. Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua yaitu persepsi

⁷ Tim penyusun, *kamus bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1657

⁸ Suharman, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Penerbit Srikandi, 2005), hlm. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian terhadap mereka mengandung resiko.

Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi didalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya, persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi disekitarnya⁹.

b. Aspek-aspek Persepsi

Menurut Walgito terdapat tiga aspek persepsi yaitu:

1. Aspek Kognitif

Aspek ini berhubungan dengan pengenalan akan obyek, peristiwa, hubungan yang diperoleh karena diterimanya suatu rangsangan. Aspek ini menyangkut pengharapan, cara mendapatkan pengetahuan atau cara berfikir dan pengalaman masa lalu. Individu dalam mempersepsikan suatu dalam dilatarbelakangi oleh adanya aspek kognitif yaitu pandangan individu terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman yang penuh pernah di dengar atau dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Aspek Afektif

Berhubungan dengan emosi, aspek ini menyangkut pengorganisasian suatu rangsang, artinya rangsangan yang diterima akan dibedakan dan dikelompokkan ke dalam emosi seseorang.

⁹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Satu Pengantar*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 167-168



Individu dalam mempersepsikan sesuatu bisa berdasarkan pada emosi individu tersebut. Hal ini karena adanya pendidikan moral dan etika yang didapatkannya sejak kecil yang akhirnya melandasi individu dalam memandang sesuatu.

3. Aspek Konasi

Konasi adalah wujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu, berhubungan dengan kemauan aspek ini menyangkut pengorganisasian dan penafsiran suatu rangsangan yang menyebabkan individu bersikap dan berperilaku sesuai dengan rangsangan yang ditafsirkan¹⁰.

c. Jenis-jenis persepsi

1. Persepsi visual

Persepsi visual dari indera penglihatan yaitu mata. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan serta sesudah melakukan pada objek yang dituju.

2. Persepsi auditoria atau pendengaran

Persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.

3. Persepsi perabaan

Persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera perabaan yaitu kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya.

¹⁰ V. Anindita Wedhasmara, "Hubungan Antara Persepsi Mahasiswa Psikologi Universitas Dharma Terhadap Profesi Psikologi Dengan Motif Berprestasi", (Skripsi Program Sarjana Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007), hlm. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Persepsi penciuman

Persepsi penciuman merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman yaitu hidung. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang di cium.

5. Persepsi pengecap

Persepsi pengecap atau rasa merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera pengecap yaitu lidah. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang dikecap atau dirasakan.¹¹

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Uday Percek, persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor ekstren

1. Intensitas: Pada umumnya, rangsangan yang intensif mendapat lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intensif.
2. Ukuran: Pada umumnya benda-benda yang lebih besar yang menarik perhatian, barang yang kontras cepat dilihat.
3. Kontras: Biasanya kita lihat cepatnya menarik hati.
4. Ulangan: Biasanya hal-hal yang berulang-ulang, menarik perhatian.
5. Keakraban: Yang lebih menarik perhatian.
6. Sesuatu yang baru: Hal-hal yang baru menarik perhatian.

b. Faktor intren

1. Latar belakang: Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi.
2. Pengalaman: pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang, hal-hal dan gejala yang serupa pengalamannya.
3. Kepribadian: kepribadian mempengaruhi juga kepada persepsi seseorang.

¹¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm 15-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. Syarat-syarat terjadinya persepsi

Menurut Sumaryo (2013) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- Adanya obyek yang dipersepsikan
- Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi
- Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

f. Proses terbentuknya persepsi

Robbins mengemukakan bahwa proses terbentuknya persepsi, berikut ini:

a. Pemilihan

Pada saat memperhatikan sesuatu berarti individu tidak memperhatikan yang lainnya. Mengapa dan apa yang disaring biasanya berasal dari beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari:

- Ukuran, sesuatu yang besar maka akan lebih mudah menarik perhatian.
- Kontras, sesuatu keadaan yang berlatar belakang kontras biasanya sangat menonjol.
- Intensitas kuatnya suatu rangsangan, contohnya suara keras di dalam ruangan yang sepi.
- Gerakan, perhatian seseorang akan lebih tertarik kepada obyek yang bergerak untuk dilihat daripada obyek sama tapi diam.
- Sesuatu yang baru. Obyek baru yang berada di lingkungan yang dikenal akan lebih menarik perhatian. Sedangkan faktor-

¹² Udai Percek, *Prilaku Organisasi*, Bandung, Pustaka Bina Persada 1984, hlm. 14-17



faktor internal yang mempengaruhi terbentuknya persepsi sebagai berikut:

Pertama, faktor fisiologis, seseorang yang distimulus oleh apa yang terjadi di luar dari dirinya melalui penginderaan seperti mata, kulit, lidah, telinga, dan hidung tidak semua memiliki kekuatan penginderaan yang sama.

Kedua, kator psikologis, meliputi motivasi dan pengalaman belajar masa lalu.

b. Pengorganisasian

Pengelolaan stimulus atau informasi melibatkan proses kognisi, dimana individu memahami dan memakai stimulus yang ada. Individu yang memiliki tingkat kognisi yang baik cenderung akan memiliki persepsi yang baik terhadap obyek yang dipersepsikan.

c. Interpretasi

Dalam interpretasi individu biasanya melihat konteks dari suatu obyek. Selain itu, interpretasi juga terjadi apa yang disebut dengan proses mengalami lingkungan, yaitu mengecek persepsi. Apakah orang lain juga melihat sama seperti yang dilihat individu melalui kensensus validitas dan perbandingan¹³.

2. Anggota Legislatif

a. Pengertian Anggota Legislatif

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif. Ketika membahas mengenai sistem pemerintahan maka akan erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara

¹³ Tantri Puspita Yazid dan Ridwan, “Proses Persepsi Diri Mahasiswa Dalam Berbusana Muslim”, FISIP Universitas Riau, Jurnal: Vol. 41 No. 2 (Desember 2017), hlm. 197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat yaitu mencapai cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV yaitu melindungi seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewena-wena, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewena-wena oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton “*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”(manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan nya). Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan istilah “*Trias Politica*”. Konsep *trias politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Prancis-1748), dimana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” yang berarti tiga “*As*” yang berarti poros/pusat, dan “*politica*” yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari *trias politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu *legislatif*, *eksekutif* dan *yudikatif*. Kekuasaan *legislatif* adalah membuat undang-undang, kekuasaan *eksekutif* adalah melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan *yudikatif* adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois* (*The spirit of laws*) menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balance*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan¹⁴.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di provinsi/kabupaten/kota. Di Indonesia DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3: “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014¹⁵.

b. Fungsi Anggota Legislatif

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintahan Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling

¹⁴ Efi yulistyowati, Endah pujiastuti, Tri Mulyani, “Penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia: studi komparatif atas undang-undang dasar Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen”, jurnal dinamika sosial budaya, Vol 18, No 2 (2 Desember 2016), hlm. 21

¹⁵ Diki ananta, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/dewan_perwakilan_rakyat_daerah, (Diakses 9 maret 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip “checks and balance”, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga, yaitu:

1. Fungsi legislasi

Hubungan antara pemerintahan daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintahan Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan *distributive justice*. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang dibuat (Laksono, 2009). Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari *supremacy of law*, ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang dihasilkan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai arah pembangunan nasional.

Syahrudin dan Taifur (2002) menjelaskan bahwa sebagai partner pemerintahan daerah dan DPRD mempunyai kewenangan dalam pembuatan kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Peranan DPRD sangat besar dalam pengesahan sebuah rancangan kebijakan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Rancangan kebijakan tersebut dapat menjadikan kebijakan daerah apabila DPRD sudah menyetujuinya. Begitu juga halnya dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang membutuhkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

persetujuan DPRD sebelum dapat diimplementasikan. Dalam proses pembahasan bersama ini, pihak eksekutif dan legislatif melakukan fungsi “*checks and balances*” untuk mencapai suatu rumusan kepentingan bersama atau publik. Bagi DPRD peran “*checks and balances*” dalam pembentukan kebijakan publik sangatlah penting sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, peran DPRD dalam pembentukan undang-undang haruslah dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen atau rakyat pemilihnya (Laksono, 2009).

2. Fungsi penganggaran

Penganggaran merupakan proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, produktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD yang diajukan pemerintahan daerah.

Menurut Laksono (2009), peran DPRD dalam penetapan APBD sangatlah penting, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kunci kebijakan ekonomi suatu daerah, yang memerlukan keterlibatan parlemen dalam penetapannya. Penetapan APBD tidak hanya menyangkut masalah teknis, namun berhubungan juga dengan aspek kebijakan publik. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah dan DPRD, bahkan partai politik berkepentingan untuk memperjuangkan aspirasi kebijakan ekonominya dalam APBD.

Peran parlemen dalam penetapan APBD sangatlah penting, hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu (Laksono, 2009):

- a) Perlunya mekanisme “*checks and balances*” dalam hubungan kerja dan kewenangan antara Pemerintahan Daerah dan DPRD (Parlemen) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Aspek keterbukaan atau transparansi. Biasanya mekanisme perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah lebih tertutup dibandingkan dengan mekanisme yang berlangsung di DPRD. Oleh karena itu, peran DPRD dalam penetapan APBD ditujukan untuk menciptakan keterbukaan dan transparansi dalam perumusan kebijakan penting bagi publik. Secara langsung hal tersebut membuka peluang partisipasi publik atau masyarakat dalam mengkritisi program serta kebijakan yang tertuang dalam APBD.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik di tingkat Undang-undang, peraturan pemerintah dan juga dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atau pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sasaran APBD bagi pemerintahan daerah, adanya pengawasan yang efektif dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik selama ini. Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD melalui alat-alat kelengkapan dan mekanisme kerja yang dimiliki merupakan suatu pertanggungjawaban posisi DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat (Laksono, 2009).

Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan. Pengawasan juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus yang ada sepanjang memiliki arti penting secara politik strategis.

Menurut Laksono (2009), pengawasan DPRD sangat diperlukan bagi pelaksanaan *good governance*. Hal ini didasarkan beberapa argumentasi atau pemikiran, yaitu:

- a) *Pertama*, Parlemen (DPRD) merupakan representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan berbagai kebijakan publik lain secara konsisten.
- b) *Kedua*, pengawasan mengaktualisasi pelaksanaan etika tata pemerintahan yang baik dan demokratis (*good governance*).
- c) *Ketiga*, pengawasan dapat digunakan untuk meredam “*penyakit*” KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme) di kalangan pemerintah, termasuk berdampak pada DPR sendiri.



- d) *Keempat*, pengawasan memungkinkan terbangunnya hubungan timbal balik (*checks and balances*) antara lembaga legislatif, eksekutif dan masyarakat sipil.

Pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu rapat kerja, rapat dengan pendapat, rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja. Di samping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak DPRD, antara lain: hak interpelasi, hak angket, hak mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat.

Menurut Kaho(2001) dalam Indriani dan Baswir(2003) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi kedua yaitu melakukan pengawasan, DPRD mempunyai hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, berhak untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, melakukan pemeriksaan, memberikan usulan-usulan, dan menanyakan pertanyaan dari masing-masing anggota.

c. Tugas dan Wewenang DPRD

Selain fungsi yang akan dijalankan oleh DPRD, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan¹⁶.

¹⁶ Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 348



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya¹⁷.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

b. Fungsi-fungsi pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubung fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan¹⁸. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternative kepuasan. Diperlukan kemampuan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 8

¹⁸ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang¹⁹.

a. Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu *what, way, where, who, dan how*. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Tindakan apa yang harus dikerjakan?
- 2) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
- 3) Dimanakah tindakan itu harus dilaksanakan?
- 4) Kapankah tindakan itu dilaksanakan?
- 5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?
- 6) Bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu?

b. Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- 2) Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- 3) Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
- 4) Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin kordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

¹⁹ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1990), hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Proses pembuatan suatu rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tugas dan tujuan
- 2) Mengobservasi dan menganalisa
- 3) Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
- 4) Membuat sintesa
- 5) Menyusun rencana²⁰.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dr. Sp. Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1) Dasar-dasar pengorganisasian

Dasar-dasar yang fundamental dari pengorganisasian adalah:

- a. Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan
- b. Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut
- c. Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung
- d. Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain²¹.

2) Prinsip-prinsip organisasi

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membantuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:

²⁰ Ibid, hlm. 52-53

²¹ Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa materi atau non materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan.
- b. Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam suatu organisasi.
- c. Delegasi kekuasaan (*delegation of Authority*)
Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsi dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
- d. Rentangan kekuasaan
Yaitu beberapa jumlah orang setepatnya menjadi bawahan seorang pemimpin itu dapat memimpin, membimbing dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
- e. Tingkat-tingkat pengawasan
- f. Kesatuan perintah dan tanggung jawab (*unity of command and responsibility*)
- g. Koordinasi untuk mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tujuan untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin gabi pencapaian tujuan organisasi sebagai keseluruhan²².

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan atau juga bias didefinisikan sebagai tindakan untuk menggambarkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dann pengorganisasian .

Penggerakan mencakup penetapan dan pemuas kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawai, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan membarikan kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut “gerak aksi” mencakup kegiatan

²² M. Manulang , Op. Cit, hlm. 71-78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kam Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan seorang manajer untuk pegawai dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai²³.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Henry Fayol)²⁴.

a. Prinsip-prinsip pengawasan

- 1) Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi
- 2) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- 3) Fleksibel
- 4) Dapat merefleksikan pola organisasi
- 5) Ekonomis
- 6) Dapat dimengerti
- 7) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif

b. Cara-cara mengawasi

- 1) Peninjau pribadi
- 2) Pengawasan melalui laporan
- 3) Pengawasan melalui laporan tertulis
- 4) Pengawasan melalui laporan kedua hal-hal yang bersifat khusus²⁵.

c. Langkah-langkah pengawasan

- 1) Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
- 2) Penilaian kinerja
- 3) Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
- 4) Pengambilan tindakan koreksi²⁶.

²³ Susilo Martoyo, Op. Cit., hlm. 116

²⁴ Sofyan Syafri, "*Manajemen Kontempore*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 282

²⁵ M. Manulang, Op.cit., hlm178-179

²⁶ Erni Tismawati Sule, Kurniwan Saefullah, "*Pengantar Manajemen*", (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), hlm. 8



4. Zakat Profesi

a. Pengertian zakat profesi

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian (Kohar, 1988: 200). Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu (Salim, 1991: 1192). Pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, dimana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan keterampilan. Dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan awam atau kuli²⁷.

Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris²⁸.

b. Landasan syar'i zakat profesi

Beberapa dalil-dalil yang bermakna kewajiban zakat secara umum:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambilah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu

²⁷ Muhammad Aziz dan Sholikhah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam", Ulul Albab Volume 15, No. 2 Tahun 2014 (188-205), hlm. 193.

²⁸ Oni Sahroni dkk, "Fikih Zakat Kontemporer", (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 126

dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan allah maha mendengar, maha mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103)²⁹.

Ada juga dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban zakat terhadap harta tertentu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267)³⁰.

Ayat pertama di atas menunjukkan *lafadz* atau kata yang masih umum; dari hasil usaha apa saja, “*infakkalah (zakatkanlah)* sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah “*Al ibratu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab*”, “bahwa ibrah (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab”. Dan tidak ada satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi. Oleh sebab itu, profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas.

Harta pendapatan dari hasil profesi dikeluarkan zakatnya karena pendapatan profesi termasuk ke dalam tiga kriteria harta (*maal*)³¹.

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 162

³⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 35

³¹ Oni sahroni dkk, Op.cit, hlm. 127





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Harta profesi mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di-*tabarru*'-kan.
- 2) Harta profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.
- 3) Harta profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Karena termasuk ke dalam kriteria harta atau *maal*, harta yang didapatkan dari hasil profesi termasuk ke dalam harta yang wajib dizakati. Bahkan pada kenyataannya, pendapatan hasil pertanian, khususnya di negara-negara nonagraris.

c. Substansi

Dewasa ini, rata-rata pendapatan setiap orang bersumber dan kegiatannya sebagai tenaga profesional atau sebagai karyawan. Sesuai dengan fatwa MUI bahwa “penghasilan” adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, dan jasa yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin, seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin, seperti dokter, pengacara, dan konsultan, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan yang pada umumnya berbasis ilmu dan keahlian tertentu dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Sedangkan penghasilan adalah pendapatan yang didapatkan oleh seseorang baik secara rutin atau tidak.

Ada dua kategori pekerjaan yang menghasilkan upah/pendapatan:

- 1) Setiap pekerjaan yang dilakukan langsung (*al-Mihan al-Hurrah*), baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan, pekerja kantoran, dan sejenisnya (*al-Mihaniyyun*) maupun pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga, misalnya



para pengrajin, pandai besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit, buruh bangunan, dan sejenisnya (*ashabul hirfa*)³².

- 2) Setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari lembaga, baik pemerintah maupun swasta (*kasb al-'Amal*), seperti karyawan. Jadi karakteristik profesi:
 - a) Segala jenis pekerjaan selain betani, berdagang, bertambang, beternak, pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu.
 - b) Imbalan atau penghasilan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para tenaga profesional tersebut, bila memenuhi syarat nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, dengan imbalan berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap atau tidak, baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan atau ataupun tenaga.

d. Ketentuan hukum

Pendapatan dalam fikih disebut *maal mustafad*, maksudnya zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-Maal al-Mustafad*) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter,

³² Ibid, hlm. 128



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman, dan lain-lain³³.

Zakat profesi (*maal mustafad*) ini bukan bahasan baru. Para ulama fikih telah menjelaskan dalam kitab-kitab klasik, di antaranya kitab *al-Muhalla* (Ibnu Hazm), *al-Mughni* (Ibnu Quddamah), *Nail al-Athar* (asy-Syaukani), dan *Subul as-Salam* (ash-Shan'ani).

Menurut mereka, setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya). Di antara para ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiah, ash-Shadiq, al-Baqir, an-Nashir, Daud Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan, az-Zuhri, dan al-Auza'i. Di Indonesia, MUI telah memfatwakan bahwa penghasilan termasuk wajib zakat.

Dalam bukunya, *al-Islam wa al-audha'al-Iqtishadiyah*, Syeikh al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap pendapatan kaum profesi wajib zakat karena beberapa landasan dan pertimbangan berikut³⁴.

- a) Ayat-ayat yang mewajibkan zakat bersifat umum, seperti firman Allah Swt.,

Artinya: *ambilah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (QS At-Taubah [9]: 103)³⁵.

³³ Ibid., hlm. 129

³⁴ Ibid., hlm 130

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 162



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menunjukan *lafadz* atau kata yang masih umum; dari hasil usaha apa saja , “*infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*” dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah “*al-ibratu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab*”, “bahwa ibroh (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab”. Dan tidak ada satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi. Oleh sebab itu, profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas.

b) Maqashid (Tujuan) Diberlakukannya Zakat

Kewajiban ini juga sesuai dengan *maqashid* diberlakukannya zakat, yaitu semangat berbagai dan memenuhi hajat dhuafa dan kebutuhan dakwah. Pendapatan keahlian profesional itu besar dan harus terdistribusi kepada segmentasi kaum dhuafa sehingga ikut memenuhi hajat mereka.

c) Ketentuan Zakat

Sesuai pula dengan kaidah umum zakat bahwa zakat diberlakukan untuk hartawan yang telah memenuhi nisab. Oleh karena itu, tidak mungkin zakat diwajibkan kepada petani yang mendapatkan penghasilan setahun, sementara karyawan mendapatkan satu kali penghasilan sama dengan penghasilan petani dalam setahun. Para ulama salaf memberikan istilah bagi harta pendapatan rutin/gaji seseorang dengan sebutan “A’thoyat”, sedangkan untuk profesi ialah “*Maal Mustafad*”³⁶.

Sebagaimana disebutkan dalam bebrapa riwayat, di antaranya Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, dan Umar bin Abdul Aziz. “Abu ‘Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya.’ Abu ‘Ubaid juga meriwayatkan bahwa Umar bin Abdulah Aziz memberi upah kepada pekerjanya dan mengambil

³⁶ Ibid., hlm. 131



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

zakatnya. Setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan wajib ditunaikan zakatnya karena ayat-ayat yang mewajibkan zakat terhadap setiap harta tanpa memilah jenis dan bentuknya, sesuai dengan maqashid; semangat berbagi dan memenuhi hajat dhuafa. Sesuai dengan kaidah umum bahwa zakat diberlakukan untuk hartawan yang telah memenuhi nisab.

e. Ketentuan Tentang Nisab, Kadar Zakat, dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

Zakat profesi memiliki ketentuan terkait nisab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkannya. Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini.

- 1) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan **zakat pertanian** dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya karena pendapatan keduanya didapatkan saat gaji (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima (menerima gaji/upah) sebesar 5%.
- 2) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan **zakat emas dan perak** dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayar di akhir tahun sebesar 2,5%.
- 3) Ketentuan hukum zakat profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan **zakat emas dan perak** dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab* (Fatwa MUI tentang zakat penghasilan).

- 4) Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa *nisab* dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Dengan analogi yang unik tersebut, maka *nisab* zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5%.

Tabel 2.1

Jenis qiyas/ ketentuan lain	Naqdain penuh	Zuru' penuh	Syabah kepada naqdain & zuru (1)	Syaba h (2)	Qiyas kepada mal mustafa d
Nisab	85 gr	653 kg	653 kg	85 gr	Tidak mansus
Waktu mengeluarka n	Haul	Panen/ dapat	Panen/ dapat	Panen/ dapat	Panen/ dapat
Tarif	2.5%	5-10%	2,5%	5-10%	2.5
Mencari nisab	200 rb/ gr x 85	653 x 10 rb	653 kg x 10 rb	200 rb x 85 gr	
Nilai nisab	46,75 jt	6,53 jt	6,53 jt	46, 75 jt	
Nilai tarif	1.168.75 0	326.25 0	2.337.50 0		

Pendapat inilah yang menjadi pilihan banyak lembaga-lembaga zakat di tanah air dan ulama-ulama kontemporer, seperti Syeikh Qardhawi. Pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang terakhir karena ada kemiripan (*syabah*) zakat profesi dengan zakat-zakat yang sudah berlaku.

- 1) Dari aspek *nisab*, di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian karena ada kemiripan (*syabah*) antara zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu baik petani maupun tenaga profesional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengeluarkan zakatnya dengan emas, maka kurang berpihak kepada *mustahik* karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah zakat. Pada saat yang sama membuka kesempatan kepada hartawan untuk membiasakan diri berzakat dan membersihkan harta dan diri mereka.

- 2) Dari aspek kadar zakat, di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%, karena jenis dan sifat yang dizakatkan lebih mirip dengan emas dan perak dimana keduanya termasuk harta (karena penghasilan keduanya berupa uang). Dan jika dianalogikan dengan zakat pertanian, itu akan memberatkan *muzaki* karena tarifnya adalah 5%³⁷.
- 3) Sedangkan dari aspek aktu mengerluarkan zakat profesi, itu dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan karena empat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra., Ibnu Umar ra., Anas., dan Aisyah ra., yang menegaskan kewajiban haul untuk seluruh harta wajib zakat. Akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat hadis tersebut itu *dhaif* dan tidak bisa menjadi sandaran hukum. Begitu pula beberapa hadis yang menegaskan kewajiban *haul* dalam *mal mustafad* (zakat profesi) termasuk hadis *dhaif*.
- 4) Oleh karena itu, para sahabat, *tabi'in*, dan ulama Hanafih, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berbeda pendapat tentang syarat haul dalam zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul.
- 5) Pendapat yang kuat (*rajih*) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa menunggu *haul*) karena tidak ada *nash* yang *shahih* atau *hasan* dan tidak ada *ijma'* ulama yang mewajibkan *haul* dalam *mal mustafad*, maka kembali kepada *nash-nash* yang umum.
- 6) Pendapat yang tidak mewajibkan *haul* lebih dekat dengan *maqashid syariah*, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial

³⁷ Ibid., hlm. 131-134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*muwasah*) dan lebih bermanfaat bagi fakir-miskin dan musah ditunaikan. Sebaiknya, mensyaratkan haul akan memberikan para hartawan tenaga profesional tanpa kewajiban zakat kepada dhuafa. Pendapat ini lebih adil karena jika petani dengan penghasilan tertentu (nisab) diwajibkan zakat, maka seorang tenaga profesional dengan penghasilan jauh lebih besar dari petani seharusnya lebih diwajibkan.

- 7) Pendapatan zakat profesi adalah harta penghasilan (profesi) itu sama dengan zakat pertanian, yaitu panen (hasil pertanian) dan jenis pendapatan yang didapatkan zakat profesi sama dengan zakat *nuqud* karena penghasilan keduanya berupa uang.
- 8) Lebih *mashlahah* bagi muzaki dan mustahik. Mashlahah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik *nisab* dan kadarnya, maka hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5%. Sedangkan jika dianalogikan dengan emas, hal ini akan kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nisab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memerhatikan mashlahah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik).
- 9) Adapun pola perhitungan bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Dr. Yusuf Qardhawi, Muhammad Ghazali, dan lain-lain. Realitarnya di Indonesia setiap penghasilan tetap sudah dikenakan pajak penghasilan (PPh) maka yang lebih realistis perhitungan zakatnya dari *take home pay*.

f. Syarat Haul dalam Zakat Profesi

Landasan yang mewajibkan haul adalah beberapa hadis Rasulullah Saw.

- 1) Empat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra, Ibnu Umar ra, Anas ra, dan Aisyah ra yang menegaskan kewajiban haul untuk seluruh



harta wajib zakat. Akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat hadis tersebut *dhaif* dan tidak bisa menjadi sandaran hukum.

- 2) Beberapa hadis yang menegaskan kewajiban haul dalam *mal mustafad* (zakat profesi) juga *dhaif*³⁸.

Oleh karena itu, para sahabat, *tabi'in*, dan ulama *Hanafiah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* berbeda pendapat tentang syarat haul dalam zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan haul. Menurut fatwa Syeikh Qardhawi, pendapat yang kuat (*rajih*) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa menunggu haul) dengan alasan-alasan berikut :

- 1) Tidak ada *nash* yang *shahih* atau *hasan* dan tidak ada ijtima' ulama yang mewajibkan haul dalam *mal mustafad* maka kembali kepada *nash-nash* yang umum.
- 2) Meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat pertanian karena dijelaskan dalam satu ayat.
- 3) Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dekat dengan *maqashid syariah*, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (*muwasath*) dan lebih bermanfaat bagi fakir- miskin juga mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan haul akan membiarkan para profesi tanpa kewajiban zakat.
- 4) Pendapat yang tidak mensyaratkan haul lebih adil. Misalnya, petani dengan penghasil tertentu (*nisab*) diwajibkan zakat, seorang tenaga profesional dengan gaji ratusan juta per bulan juga diwajibkan zakat.
- 5) Untuk zakat *kasab* (profesi) tidak mengenal haul karena sifat pendapatannya memiliki kemiripan dengan penghasilan pertanian (*yauma hashadiah*)³⁹.

³⁸ Ibid., hlm. 135

³⁹ Ibid., hlm. 136



B. Kajian Terdahulu

Sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, belum ada kajian yang sama khusus membahas masalah yang terkait dengan penelitian ini. Namun demikian, hasil penelusuran penulis ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai persepsi terhadap zakat profesi. Diantaranya adalah skripsi Murti Lisa Fitria yang berjudul “*Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Kota Banda Aceh)*”. Dalam skripsi ini dibahas tentang pemahaman pengacara mengenai penetapan nisab, besarnya zakat yang dikeluarkan, dan cara mengeluarkan zakat dari profesi seorang pengacara. Jika dilihat dari penghasilan yang di peroleh, seorang pengacara banyak menangani kasus dari seorang yang memerlukan bantuan hukum, namun mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu atau istilah hukum disebut prodeo. Jadi dalam jangka waktu setahun hanya beberapa kasus yang merupakan berbayar, selebihnya adalah penanganan kasus yang berupa bantuan hukum yang tidak berbayar.

Karya tulis lain dari Bunga Ariyanti dalam skripsinya dengan judul “*Persepsi Pimpinan dan Pelaksana Lembaga Amil Zakat Terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”. Dalam skripsi ini dibahas Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membuat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) merasa tidak tenang. Pasalnya UU tersebut seakan-akan mengkerdulkan lembaga amil zakat. Dengan adanya UU tersebut tidak ayal jika peran aktif lembaga-lembaga zakat (LAZ) semakin berkurang dalam mengambil andil praktik zakat di Indonesia, dan secara tidak langsung kinerja lembaga-lembaga tersebut pun menjadi terhambat. Karena, disamping faktor pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi, telah terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang belum bisa menjadi kualitas dan hasil yang memuaskan baik dalam aspek perzakatan maupun aspek pemerintahan lainnya. Maka dari itu, perlu adanya Undang-undang tambahan atau peraturan pemerintah yang menjelaskan secara gamblang mengenai mekanisme dan tata cara pendistribusian zakat yang sesuai dengan syari’at Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karya tulis dalam jurnal dari Mukholik dengan judul “*Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda*”.

② Dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan persepsi masyarakat terhadap hukum zakat profesi dan penerapannya, ada yang setuju dengan hukum dan tidak sedikit masyarakat yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi.

C. Konsep Operasional

Konsep oprasional digunakan untuk menjelaskan kerangka konsep dan memberikan batasan agar penelitian lebih terarah serta bisa dipahami. Untuk mengetahui seperti apa persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dapat dilihat dari aspek persepsi dan hal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- a. Kognitif adalah komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu objek, dengan indikator-indikator berikut ini:
 1. Pengetahuan Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tentang Pengelolaan Zakat Profesi
 2. Pengetahuan Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tentang landasan Pengelolaan Zakat Profesi (Undang-undang No. 23 Tahun 2011)
 3. Pengetahuan Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir tentang hukum Pengelolaan Zakat Profesi.
- b. Afektif menyangkut cara individu dalam merasakan mengaspirasikan emosi terhadap stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya kemudian mempengaruhi persepsinya. Adapun indikatornya sebagai:
 1. Anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ragu terhadap sistem pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir.
 2. Anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir senang terhadap pengelolaan zakat profesi

c. Konatif adalah kesiapan seseorang melakukan *action* atau berperilaku terhadap suatu objek. Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau turut melaksanakan agenda kegiatan rapat dalam mengesahkan perda zakat.
2. Anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau turut mengawasi pengelolaan zakat profesi.
3. Anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ikut serta dalam pendistribusian zakat profesi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum menggambarkan dan menguraikan kenyataan di lapangan menggunakan angka terhadap kenyataan sebagaimana adanya dan dipersentasikan mengikuti frekuensi kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat lalu dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Rokan Hilir, lokasi penelitian ini dibatasi pada lingkup Anggota Legislatif. Alasan pemilihan lokasi serta informan dalam penelitian ini adalah dikarenakan data terkait dengan permasalahan yang diajukan telah banyak digali dari Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan tidak adanya kendala untuk melakukan komunikasi dengan para informan. Penelitian ini difokuskan pada Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini adalah selama 6 (enam) bulan, yakni terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai selesai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Objek penelitian ini adalah persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.



D. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang berjumlah 45 orang, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian nya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar dan diatas 100, dapat diambil diantara 10-15% atau 20-25% atau lebih⁴⁰. Dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel karena populasi yang akan diteliti dibawah 100 orang yaitu 45 orang anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

E. Data dan Sumber Data

Data primer adalah data yang didapat dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber⁴¹. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban angket kuesioner dan responden dari anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel dari website yang berkaitan dengan penelitian⁴².

Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau tersedia, kemudian peneliti mengelola data tersebut, data dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang peneliti peroleh dari dokumentasi dan literatur-literatur bacaan yang relevan serta terkait dalam penelitian ini.

⁴⁰ Novi Widya Astuti, “Pengaruh Kunjungan Wisata Water Front City Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Kecamatan Siak Kabupaten Siak”, (Skripsi Program S1 Pengembangan Masyarakat Islam Universitas UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, 2020), hlm. 19-20

⁴¹ Jonathan Sarwono, “Metode riset skripsi pendekatan kuantitatif”, (Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 37

⁴² Burhan Bungin, “Metodologi penelitian kuantitatif komunikasi, dan kebijakan publik ilmu-ilmu sosial lainnya”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 119



F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam

penelitian ini adalah:

- a. Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta⁴³.
- b. Angket merupakan pertanyaan yang disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara menyebarkan angket kepada responden.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian untuk dijadikan bahan penelitian ini.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah⁴⁴. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden penelitian dengan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan oleh para peneliti guna mengukur persepsi atau sikap seseorang, skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban atau respon terhadap skala ukur yang disediakan⁴⁵. Dalam menilai sikap atau tingkah laku seseorang terlebih dahulu diberikan pertanyaan kepada responden dimintak

⁴³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", Jurnal at-Taquaddum Vol. 8, No. 01 (Juli 2016), hlm. 26

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 203

⁴⁵ Sukardi, "Metodologi Penelitian Pendidikan", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 146



menjawab dengan sesuai skala ukur yang telah disediakan, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Skala ini menggunakan alternatif pilihan 1 sampai 5 jawaban pertanyaan dengan ketentuan skala likert dan bobot score sebagai berikut:

- 5 = Sangat setuju (SS)
- 4 = Setuju (S)
- 3 = Tidak setuju (TS)
- 2 = Kurang setuju (KS)
- 1 = Sangat tidak setuju (STS)

H. Uji Validitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan ukuran suatu instrument terhadap konsep yang diteliti. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat⁴⁶.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik ini menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P= Angka persentase

F= Frekuensi (jumlah responden yang memilih jawaban)

N= Total jumlah responden

Dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut:

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 211



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. 76 – 100% termasuk kedalam kategori baik.
2. 56 – 75% termasuk kedalam kategori kurang baik.
3. 0 – 55% termasuk kedalam kategori tidak baik.

Penelitian ini memiliki 3 aspek indikator persepsi yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek konatif, maka perlu dicari nilai rata-rata (*mean*) guna untuk membuat kesimpulan mengenai persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan menggunakan rumus dari Suharsimi Arikunto, sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum x}{\sum N}$$

Keterangan:

X =rata-rata hitung

$\sum x$ =jumlah nilai kelompok sampel

$\sum N$ =jumlah kelompok sampel⁴⁷.

⁴⁷ Agus Salim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Di Masjid AL-UBUDIAH Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis", (Skripsi Program S1 Manajemen Dakwah Universitas UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru, 2020), hlm. 32

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan pemerintahan Kontroleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir⁴⁸.

B. Letak Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Pusat pemerintahan berada di kompleks perkantoran Batu Enam Bagansiapiapi yang memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara sungai rokan yang berhadapan langsung ke laut Selatan Malaka. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian Pesisir Timur Pulau Sumatera anatar 1014'-2030' LU dan 100016'-101021' BT. Luas wilayah

⁴⁸ Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, "Sejarah Rokan Hilir", Dalam <https://rohilkab.go.id/pages/sejarah-singkat-rokan-hilir> (diakses 22 November 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 KM², Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 Kecamatan, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tanah Putih seluas 1.915,23 KM² dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 KM².

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan Januari.

Batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara



C. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 4.1
Masa Jabatan 2019-2024

N O.	NAMA	JABATAN
1	MASTON	KETUA DPRD
2	H. ABDULLAH	WAKIL KETUA I
3	BASIRAN NUR EFENDI, SE	WAKIL KETUA II
4	HAMZAH, S. Hi., MM	WAKIL KETUA III
5	RALY ANUGRAH HARAHAP, S. Sos, M.M	KETUA KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM
6	RIDUAN	WAKIL KETUA KOMISI A
7	PURNOMO, S. Ag	SEKRETARIS KOMISI A
8	ASWIN, SE	ANGGOTA
9	KRISMANTO	ANGGOTA
10	NAJARUDDIN	ANGGOTA
11	H. ZULIFLI, S. Ag	ANGGOTA
12	JUMADI, SP	ANGGOTA
13	SYAMSUL AKMAL, S. Pd	ANGGOTA
14	IMAM SUROSO, SE	ANGGOTA
15	BUDI SANTOSO, SH	KETUA KOMISI B PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
16	RIYADI, SH	WAKIL KETUA KOMISI B
17	HERNAWAN	SEKRETARIS KOMISI B
18	H. JASMADI IJASKORI, SE	ANGGOTA
19	DARWIS SYAM	ANGGOTA
20	DODI SAPUTRA, SH	ANGGOTA
21	SURYANTO	ANGGOTA
22	MUZARDIN	ANGGOTA
23	UCOK MUKHTAR	ANGGOTA
24	JHONNI SIMANJUNTAK	ANGGOTA
25	MUHAR RIZA, S. AP	KETUA KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN DAERAH
26	SYAHRIN USMAN, S. Sos	WAKIL KETUA KOMISI C
27	FAZRUL HIDAYAT LUBIS, SE	SEKRETARIS KOMISI C
28	ILHAMMI, S. Tr. Keb	ANGGOTA
29	SUDIRMAN	ANGGOTA
30	HJ. SUNIRAH, S. Pd	ANGGOTA
31	FATLI	ANGGOTA
32	AMANSYAH	ANGGOTA
33	PERWEDISSUITO, SP	ANGGOTA
34	MUHAMMAD FIRDAUS, NZ., S. Sos, M. IP	ANGGOTA
35	MARIA TAMBUNAN	ANGGOTA
36	ELFARINDA, S. Pd	KETUA KOMISI D BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
37	SYAMSUDDIN, SP	WAKIL KETUA KOMISI D
38	HENDRIZA	SEKRETARIS KOMISI D
39	Hj. RUSMANITA	ANGGOTA
40	RISBEN NDUWARI TAMBUN SARIBU, SE	ANGGOTA
41	SUMINI	ANGGOTA
42	JEFRI B., S. Pd.i	ANGGOTA
43	ISMARYANTI	ANGGOTA
44	DANA PATRA, SH	ANGGOTA
45	Hj. HARMIDA	ANGGOTA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 4.2

Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin⁴⁹

No.	Indikator	Jumlah Legislatif	
		LK	PR
1.	Jumlah anggota	37	8
Jumlah anggota		45 Orang	

E. Agama

Tabel 4.3

Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Agama⁵⁰

No	Indikator	Agama	
		Islam	Kristen
1.	Jumlah Anggota	43	2
Jumlah		45 Orang	

F. Usia

Tabel 4.4

Jumlah Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Usia⁵¹

No.	Golongan Umur	Jumlah Anggota		
		LK	PR	Total Jiwa
1.	26 - 35 T	10	1	11
2.	36 - 45 T	15	2	17
3.	46 - 50 T	9	4	13
4.	51 - 60 T	3	1	4
Jumlah		37	8	45

⁴⁹ Dokumentasi Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 14 Desember 2020

⁵⁰ Dokumentasi Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 14 Desember 2020

⁵¹ Dokumentasi Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 14 Desember 2020



G. Pendidikan

Tabel 4.5

Pendidikan Anggota Legislatif Kab. Rokan Hilir⁵²

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	20
2.	S1	22
3.	S2	3
Jumlah		45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Dokumentasi Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 14 Desember 2020

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data disajikan dan dianalisis melalui penyebaran angket, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dikategorikan **“Baik”**, dengan hasil persentase rata-rata (*mean*) sebesar (76%). Hasil dari 3 aspek persentase yakni, aspek kognitif atau pengetahuan anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi adalah “Baik” dengan persentase (76,8%), aspek afektif atau penilaian anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi adalah “Baik” dengan persentase (82,13%), dan aspek konatif atau tindakan anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi “Kurang baik” dengan persentase (67,9%) yang paling dominan adalah aspek afektif dengan jumlah persentase 82,13%.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Kepada Baznas Kabupaten Rokan Hilir untuk lebih transparan.
2. Kepada Baznas Kabupaten Rokan Hilir dalam mendistribusiakan dana zakat agar lebih merata kesetiap desa-desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Kepada Baznas Kabupaten Rokan Hilir untuk lebih mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ke media-media sosial agar masyarakat Rokan hilir lebih tahu dan bisa menjadi pengawas aktif disetiap kegiatan-kegiatan di Bazanas kabupaten Rokan Hilir.
4. Kepada Baznas Kabupaten Rokan Hilir agar melakukan kerja sama atau mengikutsertakan Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hilir dalam pendistribusian dana zakat demi terciptanya pemerataan dana zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2011. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: Cv. Rajawali.
- Bungin Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daryanto. 1997. *Kamus Indonesia Lengkap*. Jakarta: Cv. Rajawali.
- Fauzi Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Walisongo.
- Khotimah Syanita Khusnul. 2019. *Kumpulan Tulisan: Kompilasi Fikih Ibadah Milenial*. Jakarta: Guepedia.
- Manulang M. 1990. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Martono Susilo. 1998. *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyana Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Satu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Percek Udai. 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Bina Persada.
- R. Terry George. 2018. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sahroni Oni, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Saifudin. 2014. *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarwono Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2014. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Penerbit Srikandi.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



Soewadju Jusup. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Syafri Sofyan. 1996. *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thoha Miftah. 1983. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Trisnawati Erni. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Walgito Bimo. 1989. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu.

Jurnal

Aryanti Bunga. *Pemimpin dan Pelaksana Lembaga Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat*. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas UIN Syarif Hidayatullah. (2014)

Aziz Muhammad, Sholikhah. *Zakat Profesi Dalam Persepektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam*. Ulul Albab Vol. 15, No. 2 (2014)

Hasanah Hasyim. *Teknik-teknik Observasi*. Jurnal at-Taquaddum Vol. 8, No. 01 (Juli 2016)

Lisa Fitria Murti. *Persepsi Pengacara Terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI- LBH Kota Banda Aceh)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY. (2017)

Mukholik. *Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda*. Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan & Masyarakat (2019)

Muklisin. *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo)*. Jurnal Ilmiah Syariah Vol 17, No. 02 (Juli-Desember 2018)

Purbasari Indah. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat di Surabaya dan Gersik*. Universitas Trunojoyo Madura.

Puspita Yazidi Tantri, Ridwan. *Proses Persepsi Diri Mahasiswa Dalam Berbusana Muslim*. Fisip Universitas Riau. Jurnal Vol. 41, No. 2 (Desember 2017)

Salim Agus. *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan*



Bantan Kabupaten Bengkalis. Skripsi Program Sarjana Manajemen Dakwah UIN SUSKA RIAU (2020)

Wedhasmara V. Anindita. *Hubungan Antara Persepsi Mahasiswa Psikologi Universitas Dharma Terhadap Profesi Psikologi Dengan Motif Berprestasi* (Skripsi Program Sarjana Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2007)

Yulistyowati Efi, dkk. *Penerapan Konsep Trias Political Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol. 18, No. 2 (2 Desember 2016)

Internet

Ananta Diki, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/dewanperwakilanrakyatdaerah>, diakses pada 22 November 2020, pukul 20.00 WIB

Arya Abdul, Lembaga Legislatif
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/lembagalegislatif>, diakses pada 14 Maret 2020, pukul 07.00 WIB

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. *Sejarah Rokan Hilir*
<https://rohilkab.go.id/pages/sejarah-singkat-rokanhilir>, diakses pada 22 November 2020, pukul 20.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LAMPIRAN I

ANGKET PENELITIAN

A. Keterangan

- Angket ini disebarakan untuk melengkapi penyelesaian skripsi yang sedang saya kerjakan
- Jawaban bapak/ibu tidak ada pengaruhnya terhadap pekerjaan bapak/ibu
- Sebelum bapak/ibu menjawab pertanyaan yang telah disediakan, mohon isi daftar identitas yang telah disediakan
- Atas partisipasi bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

B. Identitas Responden

- Nama Responden :
- Jenis Kelamin :
- Usia :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :

C. Daftar Pertanyaan

a) Aspek Kognitif

- Apakah bapak/ibu mengetahui tentang sistem pengelolaan zakat profesi?
 - Sangat tahu
 - Tahu
 - Kurang tahu
 - Tidak tahu
 - Sangat tidak tahu
- Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hukum pengelolaan zakat profesi?
 - Sangat tahu
 - Tahu
 - Kurang tahu
 - Tidak tahu
 - Sangat tidak tahu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apakah bapak/ibu mengetahui siapa saja orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat profesi?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Kurang tahu
 - d. Tidak tahu
 - e. Sangat tidak tahu
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang landasan/ undang-undang pengelolaan zakat profesi?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Kurang tahu
 - d. Tidak tahu
 - e. Sangat tidak tahu
5. Apakah bapak/ibu selama ini mengetahui tentang pendapatan jumlah dana zakat profesi yang dihimpun oleh badan amil zakat kabupaten Rokan Hilir?
 - a. Sangat tahu
 - b. Tahu
 - c. Kurang tahu
 - d. Tidak tahu
 - e. Sangat tidak tahu

b) Aspek afektif

6. Bagaimana penilaian/ tanggapan bapak/ibu tentang sistem pengelolaan dana zakat profesi yang selama ini dilakukan oleh badan amil zakat Kabupaten Rokan Hilir?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik
7. Bagaimana penilaian/ tanggapan bapak/ibu tentang pengelolaan zakat profesi di badan amil zakat Kabupaten Rokan Hilir apakah sudah berjalan dengan baik?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
 - e. Sangat tidak baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Apakah bapak/ibu senang terhadap pendapatan jumlah dana zakat profesi yang telah dikelola oleh badan amil zakat Kabupaten Rokan Hilir?
 - a. Sangat senang
 - b. Senang
 - c. Kurang senang
 - d. Tidak senang
 - e. Sangat tidak senang
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu sebelum pendistribusian zakat, badan amil zakat harus melakukan survei terlebih dahulu terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju
10. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pendistribusian zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat ?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang setuju
 - d. Tidak setuju
 - e. Sangat tidak setuju

c) Aspek konatif

11. Apakah anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir ikut membantu dalam mengesahkan perda zakat?
 - a. Sangat membantu
 - b. Membantu
 - c. Kurang membantu
 - d. Tidak membantu
 - e. Sangat tidak membantu
12. Apakah bapak/ibu ikut membantu badan amil zakat melakukan survei terhadap mustahiq ?
 - a. Sangat membantu
 - b. Membantu
 - c. Kurang membantu
 - d. Tidak membantu
 - e. Sangat tidak membantu
13. Apakah bapak/ibu setuju mengikuti rapat sebelum Baznas melakukan pendistribusian zakat profesi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | d. Tidak setuju |
| b. Setuju | e. Sangat tidak setuju |
| c. Kurang setuju | |

14. Apakah bapak/ibu membantu badan amil zakat dalam penerimaan zakat profesi dari muzaki?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. Sangat membantu | d. Tidak membantu |
| b. Membantu | e. Sangat tidak membantu |
| c. Kurang membantu | |

15. Apakah bapak/ibu membantu mengantar dana zakat profesi yang siap untuk didistribusikan kepada mustahiq?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| a. Sangat membantu | d. Tidak membantu |
| b. Membantu | e. Sangat tidak membantu |
| c. Kurang membantu | |

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN II

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	ITEM	TEKNIK PENGAMBILAN DATA
PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU	1 Variabel (Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi)	Aspek Kognitif	Pengetahuan anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir terhadap pengelolaan zakat profesi.	5	Angket
		Aspek Afektif	Penilaian anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir terhadap pengelolaan zakat profesi	5	Angket
		Aspek Konatif	Tindakan anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir terhadap pengelolaan zakat profesi	5	Angket
Total				15	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III Frequency Tabel

Pertanyaan 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	12	26.6	26.6	26.6
2	28	62.2	62.2	62.2
3	1	2.2	2.2	2.2
4	4	8.8	8.8	8.8
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2.2	2.2	2.2
2	31	68.8	68.8	68.8
3	9	20	20	20
4	4	8.8	8.8	8.8
total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	8	17.7	17.7	17.7
2	34	75.5	75.5	75.5
3	1	2.2	2.2	2.2
4	2	4.4	4.4	4.4
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	8	17.7	17.7	17.7
2	33	73.3	73.3	73.3
3	1	2.2	2.2	2.2
4	3	6.6	6.6	6.6
Total	45	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	5	11.1	11.1	11.1
2	22	48.8	48.8	48.8
3	7	15.5	15.5	15.5
4	8	17.7	17.7	17.7
5	3	6.6	6.6	6.6
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	14	31.1	31.1	31.1
2	25	55.5	55.5	55.5
3	4	8.8	8.8	8.8
4	2	4.4	4.4	4.4
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	11	24.4	24.4	24.4
2	25	55.5	55.5	55.5
3	8	17.7	17.7	17.7
4	1	2.2	2.2	2.2
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	6.6	6.6	6.6
2	40	88.8	88.8	88.8
3	2	4.4	4.4	4.4
Total	45	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan 9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	22	48.8	48.8	48.8
2	23	51.1	51.1	51.1
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	13.3	13.3	13.3
2	28	62.2	62.2	62.2
3	10	22.2	22.2	22.2
4	1	2.2	2.2	2.2
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	24	53.3	53.3	53.3
2	18	40	40	40
4	3	6.6	6.6	6.6
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	13.3	13.3	13.3
2	21	46.6	46.6	46.6
3	7	15.5	15.5	15.5
4	9	20	20	20
5	2	4.4	4.4	4.4
Total	45	100.0	100.0	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan 13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	8.8	8.8	8.8
2	25	55.5	55.5	55.5
3	2	4.4	4.4	4.4
4	14	31.1	31.1	31.1
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2.2	2.2	2.2
2	24	53.3	53.3	53.3
3	9	20	20	20
4	10	22.2	22.2	22.2
5	1	2.2	2.2	2.2
Total	45	100.0	100.0	

Pertanyaan 15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	7	15.5	15.5	15.5
3	16	35.5	35.5	35.5
4	10	22.2	22.2	22.2
5	12	26.6	26.6	26.6
Total	45	100.0	100.0	

UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI



Photo 4.1

Bersama Wakil Ketua II DPRD Kab. Rokan Hilir Bapak Basiran Nur Efendi, SE



Photo 4.2

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Komisi B
Bapak Dodi Sahputra, SH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Photo 4.3

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Komisi C Ibu Hj. Sunirah, S. Pd



Photo 4.4

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Komisi D Bapak Jefri. B, S. Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Photo 4.5

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Wakil Ketua Komisi D Bapak Syamsudin, SP



Photo 4.6

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Ketua Komisi A Bapak Raly Anugrah Harahap, S. Sos. M.M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Photo 4.7

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Wakil Ketua Komisi A Bapak Riduan



Photo 4.8

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Komisi A
Bapak Syamsul Akmal, S. Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Photo 4.9

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Sekretaris Komisi B
Bapak Hermawan



Photo 4.10

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Komisi A Bapak Najaruddin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Photo 4.11

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Komisi B Bapak Darwis Syam & Bapak Muzardin



Photo 4.12

Bersama Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir Wakil Ketua Komisi C Bapak Syahrin Usman, S. Sos & Komisi A Bapak Jumadi, SP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Photo 4.13

Kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33615
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F.IV/PP.00.9/3411/2020** Tanggal 2 Juli 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

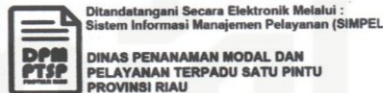
- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : NOVIA ANJAR SARI |
| 2. NIM / KTP | : 11744202652 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Juli 2020



Revisi :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Rokan Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIAPIPI

Bagansiapiapi, 19 Oktober 2020

070/Kesbangpol/2020/245
Bisa
Rekomendasi Riset

Kepada :
Yth. Ketua DPRD dan Anggota DPRD
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33615 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **NOVIA ANJAR SARI**
2. NIM / KTP : 11744202652
3. Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : **PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN ROKAN HILIR**
7. Lokasi : KANTOR DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR



EADLI, SH, M Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750811 200012 1 004

Salinan Kepada Yth :
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
yang bersangkutan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR SEKRETARIAT DPRD

Kompleks Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sei. Rokan Kecamatan Bangko
BAGANSIAPIPI

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 175/SETWAN-RH/II/2021/ 17

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 19 Oktober 2020, Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir menerangkan bahwa :

Nama	: NOVIA ANJAR SARI
NIM	: 11744202652
Universitas	: UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Program Studi	: MANAJEMEN DAKWAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Lokasi	: KANTOR DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR

Bahwa yang nama yang tersebut diatas benar telah melakukan Riset dan Pengumpulan Data dengan judul **"PERSEPSI ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN ROKAN HILIR"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 08 Februari 2021

Plt. SEKRETARIS DPRD
KAB. ROKAN HILIR



H. SARMAN SYAHRONI, ST
NIP. 19790615 200212 1 007

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokauh



Novia Anjar Sari lahir di Bangko Sempurna 20 November 1999. Putri dari ayahanda alm. Sajidi dan ibunda Lisnawai. Anak pertama dari 2 bersaudara, 2 orang perempuan. Bertempat tinggal di Desa Bangko Sempurna Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah, antara lain:

1. Negeri 015 Karya Sempurna masuk pada tahun 2007 selesai pada tahun 2012 (selama 6 tahun), penulis melanjutkan ke,
2. SMP Negeri 06 Karya Sempurna selama 3 tahun masuk pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke,
3. SMKS Nusantara selama 3 tahun, masuk pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan ke,
4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat Dan Wakaf.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 dan melaksanakan praktek kerja lapangan/job training di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir selama 2 bulan. Atas berkat rahmat Allah Ta'ala serta do'a dari orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau"** dibawah bimbingan langsung Dr. Masduki, M. Ag berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada tanggal 09 Maret 2021, penulis dinyatakan LULUS dengan predikat SANGAT MEMUASKAN dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh